

Sugianto, E. A., Ismanto, S. U. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Desa Jangkurang Melalui Tembok Penahan Tanah (TPT). *Prediksi*. Vol. 24 (1) 1-16.

Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Desa Jangkurang Melalui Tembok Penahan Tanah (TPT)

Exsi Aprilia Sugianto^{1*}, Slamet Usman Ismanto²

^{1,2} Universitas Padjadjaran

Email: ¹exsi20001@mail.unpad.ac.id, ²slamet.ismanto@unpad.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

10 Januari 2025

Received in revised form:

15 Februari 2025

Accepted:

12 Maret 2025

Keyword:

Disaster Mitigation,
Landslide, Community
Participation, Retaining Walls

Kata Kunci:

Mitigasi Bencana, Tanah
Longsor, Partisipasi
Masyarakat, Tembok
Penahan Tanah

ABSTRACT

This research is motivated by the frequent occurrences of landslides in Jangkurang Village, especially during the rainy season. The Retaining Wall Construction Program (Tembok Penahan Tanah - TPT) has been implemented as a mitigation effort in each vulnerable area prone to landslides within the community. Therefore, its execution involves active participation from the community. However, the implementation of the TPT construction is suspected to be suboptimal due to the lack of community participation in mitigation efforts. The purpose of this research is to examine how the community participates in each stage of TPT construction activities in Jangkurang Village. This research uses a qualitative approach with a case study research design. The research findings state that community participation in the construction of TPT in Jangkurang Village has been well underway but not fully optimal. Full participation from the community is evident during the implementation and benefit-taking stages, with control fully held by the community itself. On the other hand, challenges are identified in maintenance due to the community's lack of capacity in disaster management. This significantly affects sustainable development programs. Meanwhile, during the decision-making and evaluation stages, community participation remains somewhat superficial, represented by partial involvement from stakeholders.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah bencana tanah longsor yang sering terjadi di Desa Jangkurang terutama pada musim penghujan. Program pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) menjadi upaya mitigasi yang dilakukan pada setiap wilayah rawan dan berpotensi longsor di lingkungan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun pelaksanaan pembangunan TPT ini diduga belum optimal akibat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap upaya mitigasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan TPT di Desa Jangkurang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan TPT di Desa Jangkurang sudah berlangsung dengan baik namun belum optimal. Partisipasi penuh dari masyarakat berada pada tahap implementasi dan pengambilan manfaat dengan kontrol yang dipegang secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Disisi lain, ditemukannya kendala pada pemeliharaan karena kurangnya kapasitas masyarakat terhadap kebencanaan. Hal ini berpengaruh besar pada program pembangunan yang berkelanjutan. Sementara pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi partisipasi masyarakat masih bersifat semu dengan bentuk keterwakilan dan melibatkan penuh ada dari pemangku kepentingan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: exsi20001@mail.unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sebagai negara dengan frekuensi bencana alam yang tinggi, pemerintah Indonesia membentuk sistem penanggulangan bencana melalui beberapa kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini dilakukan sebagai respon pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari bencana demi mewujudkan kesejahteraan umum (UU No 24, 2007). Dampak dari bencana itu sendiri tentu saja akan memberikan kerugian dan kerusakan pada berbagai aspek kehidupan manusia yang dalam kondisi tertentu juga dapat mempengaruhi keberlangsungan dan ketahanan pembangunan secara regional maupun nasional. Dapat dikatakan demikian karena kejadian bencana selain dapat merusak infrastruktur umum, tetapi juga dalam proses penanganannya memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga fokus pembangunan dapat beralih pada upaya penanganan dan pemulihan pascabencana serta dapat menghambat atau bahkan menunda program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk itu, diperlukan langkah preventif dalam mengurangi ancaman dan risiko bencana tanah longsor.

Mitigasi merupakan salah satu rangkaian upaya penanggulangan bencana yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan pengurangan risiko terhadap bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta beberapa kebijakan turunannya, pelaksanaan mitigasi dapat dilakukan melalui pembangunan fisik (struktural) dengan membentuk rekayasa teknis terhadap bangunan tahan bencana yang dirancang sedemikian rupa sebagai struktur penahan ataupun sebagai struktur yang dapat mengurangi dampak dari bencana yang terjadi dengan memperhitungkan karakteristik dan potensi bencana di wilayahnya (PP No 21, 2008). Selain itu terdapat mitigasi nonfisik (nonstruktural) berupa peningkatan kapasitas masyarakat terhadap kebencanaan dengan tujuan untuk merubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat agar peka dan siap siaga terhadap bencana yang salah satunya dapat dilakukan melalui pembuatan kebijakan.

Dilansir dari laman Infolaras (BPBD Kabupaten Garut, 2022) jumlah kejadian bencana berdasarkan jenis bencana di Kabupaten Garut pada periode 1 Januari-31 Desember 2021 mencatat bahwa bencana tanah longsor berada di urutan pertama dengan jumlah kejadian bencana sebanyak 155 kejadian. Bencana tanah longsor (*landslide*) merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi Jawa Barat (Bidang Statistik Diskominfo Jawa Barat, 2020) terutama di Kabupaten Garut akibat struktur dan kondisi wilayah dengan ketinggian dan kemiringan yang cukup terjal serta bervariasi di setiap wilayahnya. Bencana ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi permukaan tanah, kondisi geologi dari segi jenis tanah dan batuan lereng di wilayahnya, serta kondisi hidrologi seperti curah hujan yang tinggi.

Desa Jangkurang menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Garut yang masuk ke dalam kategori desa rawan bencana tanah longsor karena memiliki potensi dan kejadian bencana yang cukup sering terjadi terutama pada musim penghujan. Hal ini disebabkan karena kondisi dan struktur wilayah Desa Jangkurang yang didominasi oleh bukit dan pegunungan, serta pemukiman masyarakat yang sebagian besar berada di kawasan lereng maupun tebing yang curam. Meskipun bencana tanah longsor yang sering terjadi merupakan bencana dalam skala kecil yang tidak menyebabkan korban jiwa seperti longsor yang menimbun jalan atau pertanian warga, akan tetapi potensi dan risiko bencana disana tetap harus menjadi perhatian publik karena dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat mengingat akan pemukiman

masyarakat yang berada di kawasan tebing dan pegunungan. Desa Jangkurang secara bertahap telah melakukan upaya mitigasi struktural melalui pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau sering disebut *retaining wall* sebagai infrastruktur untuk mengatasi tekanan pada tanah agar tanah lebih stabil sehingga dapat mencegah tanah maupun material lain dari tebing ataupun bukit untuk longsor. Program pembangunan TPT ini bahkan menjadi program pembangunan prioritas di Desa Jangkurang. TPT biasanya digunakan dalam situasi-situasi di mana terdapat perubahan tinggi pada topografi, seperti pada konstruksi bangunan di lereng bukit, jalan setapak atau tanggul, di area terasering, serta dipinggiran sungai.

Pada faktanya diantara longsor skala ringan, longsor TPT juga menjadi hal yang sering terjadi di Desa Jangkurang. Pada bulan Desember tahun 2022 di Kampung Singkur RW 11 terjadi bencana tanah longsor dan longsor TPT paling besar yang pernah terjadi sejauh ini. Bencana ini menyebabkan dua rumah hancur parah dan dua rumah lainnya mengalami kerusakan ringan, kemudian menimbulkan tiga orang korban luka, menggerus jalan lingkungan di atasnya, serta mengancam rumah warga yang berada di area tersebut. Selain diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, longsornya TPT ini diduga juga dipicu oleh aliran limbah rumah tangga seperti air sabun yang langsung mengarah ke TPT tanpa pipa atau saluran khusus. Hal ini menyebabkan resapan air yang semakin banyak sehingga merubah unsur tanah dan material TPT yang akhirnya menimbulkan kebocoran atau bahkan retakan pada tembok akibat tidak sanggup menahan intensitas air yang tinggi. Kejadian ini menunjukkan bahwa terdapat masalah pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan TPT sebagai infrastruktur mitigasi bencana tanah longsor di Desa Jangkurang. Praduga sementara menyatakan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mitigasi masih belum optimal.

Pada dasarnya suatu mitigasi tidak dapat berjalan tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini karena dalam perspektif administrasi pembangunan, pelaksanaan mitigasi menitikberatkan pada partisipasi aktif dari masyarakat selaku pihak yang terkena dampaknya secara langsung terhadap aspek kebencanaan maupun dalam setiap proses pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Dengan kata lain mengikutsertakan masyarakat dapat mengoptimalkan upaya mitigasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Administrasi pembangunan itu sendiri merupakan serangkaian proses melibatkan rangkaian upaya untuk membimbing, mengawasi dan memastikan bahwa perkembangan masyarakat bergerak ke kehidupan yang lebih modern dan sejahtera melalui koordinasi dan manajemen yang terstruktur (Anggara & Sumantri, 2016).

Masyarakat merupakan pihak yang secara tradisional mendapatkan pengetahuan mengenai tanda-tanda akan terjadi bencana yang didapatkan dari pengalaman dan pengamatan terdahulu (Warsono & Buchari, 2019) Artinya masyarakat secara tradisional dengan budaya lokal yang kuat mampu menjadi potensi mendasar yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan mitigasi bencana, sebab kapasitas masyarakat lokal dapat menjadi unsur penting dalam perencanaan pengurangan risiko yang efektif (Zubir & Amirrol, 2011). Hal ini juga sejalan dengan setiap kebijakan penanggulangan bencana yang juga menjelaskan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk mitigasi merupakan suatu hal yang didasari oleh kolaborasi antara pemangku kepentingan mulai dari pemerintahan, sektor/badan usaha (swasta), serta masyarakat (Warsono & Buchari, 2019). Oleh karenanya mitigasi bencana berbasis partisipatif menjadi suatu strategi alternatif dalam menghadapi ancaman bencana.

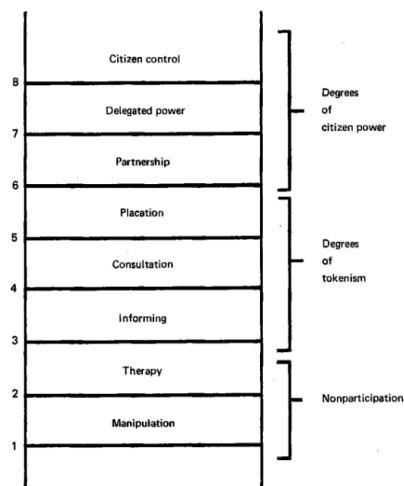
Pendekatan pembangunan partisipatif mengedepankan konsep bahwa dasar atau landasan pembangunan seharusnya berasal dari kesadaran dan inisiatif mandiri masyarakat, dengan tujuan dan harapan besar pada keikutsertaan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi melalui kontribusi sumber daya yang dimiliki (Fajriah, 2023)

Sementara Pasaribu dalam Tawai dan Yusuf (Tawai & Yusuf, 2017) menjelaskan bahwa untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi perlunya membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat dengan adanya rasa senasib sepenanggungan, adanya rasa pada keterikatan tujuan hidup, kemampuan dalam menyesuaikan diri dalam keadaan tertentu, adanya pihak yang memprakarsai partisipasi, serta terciptanya iklim partisipatif.

Integrasi pembangunan dengan partisipasi aktif dari masyarakat sama dengan mengurangi risiko bencana yang mungkin dihadapi oleh masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat dapat menjadi aspek yang dapat berkontribusi secara signifikan dalam memberikan dorongan terhadap kesadaran dan pemahaman masyarakat guna mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana salah satunya melalui pembangunan infrastruktur TPT sebagai upaya mengurangi risiko bencana (Silitonga, 2021). Dapat dikatakan demikian karena semakin besar keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana, maka semakin siap mereka untuk menghadapi potensi risiko dari bencana itu sendiri karena telah mendapatkan pemahaman lebih dari keikutsertaan mereka didalam melaksanakan program pembangunan mitigasi bencana (Kinanthi, 2022). Dengan begitu, penting untuk mengetahui bagaimana bentuk, tahapan dan tingkatan partisipasi masyarakat terhadap mitigasi bencana untuk mengoptimalkan upaya mitigasi berbasis partisipatif agar dapat berjalan optimal.

Untuk menunjukan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan Cohen dan Uphoff (Cohen & Uphoff, 1980) berpendapat bahwa hal tersebut dapat dilihat melalui bentuk dan tahapan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang bersifat sebagai sebuah siklus serta berkelanjutan, diantaranya (1) partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, berfokus pada identifikasi kebutuhan atau masalah untuk menentukan strategi alternatif melalui pengambilan keputusan bersama yang diwujudkan dalam penyampaian ide, gagasan, perumusan dan penilaian terhadap pembangunan, (2) partisipasi dalam Implementasi dimana keikutsertaan masyarakat dapat berupa kontribusi dan pemanfaatan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan atau program. Pada tahap pelaksanaan unsur-unsur masyarakat maupun sumber daya tersebut menjadi faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan. Tahapan ini biasanya mendapatkan perhatian lebih dari administrator karena memiliki peran dalam mencapai keberhasilan program, (3) partisipasi dalam Pengambilan Manfaat, setiap kegiatan partisipasi pada pelaksanaan akan menghasilkan output yang dinilai berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Tahap ini menitikberatkan pada seberapa baik output yang didapatkan sehingga masyarakat mampu mendapatkan manfaat materil, sosial, maupun untuk personal yang dapat digunakan dalam bentuk apapun oleh masyarakat, dan (4) partisipasi dalam Evaluasi, partisipasi pada tahap ini berkaitan dengan proses pelaksanaan program secara keseluruhan, dengan melakukan umpan balik terhadap hasil program untuk mengukur pencapaian program pembangunan. Pendapat Cohen dan Uphoff (Cohen & Uphoff, 1980) ini menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan partisipasi yang masing-masing saling bersinggungan dan membentuk siklus. Hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana partisipasi masyarakat terlibat dalam suatu program pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat ini juga dapat dilihat melalui tangga partisipasi menurut Arnstein (Arnstein, 1969) yang terdiri dari tingkat *nonparticipation*, *tokenism*, dan *citizen control* dengan jumlah 8 tangga.



Gambar 1. Tangga Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang berfokus pada upaya mitigasi berbasis partisipatif, maka diperlukan analisis tahap, bentuk dan tingkatan partisipasi masyarakat berdasarkan teori yang telah dikemukakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat turut serta dalam upaya mitigasi melalui pembangunan TPT sehingga dapat meningkatkan dan mewujudkan tujuan program mitigasi bencana berbasis partisipasi di Desa Jangkurang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai rencana dan langkah-langkah yang mempengaruhi asumsi, teori, desain dan metode penelitian sebagai induk rencana pelaksanaan penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Desain penelitian ini menggunakan studi kasus yang bertujuan untuk mengembangkan proses analisis lebih mendalam melalui pembelajaran secara intensif terhadap suatu program pembangunan TPT sebagai upaya mitigasi bencana tanah longsor di Desa Jangkurang Kabupaten Garut yang didasarkan pada partisipasi masyarakat, sehingga proses analisis yang dilakukan pada lebih dari satu individu saja dengan informan yang terdiri dari Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum, Pemerintah Kecamatan serta BPBD Kabupaten Garut.

Melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti dapat mengobservasi, mengkaji dan memahami secara lebih lanjut terkait partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana tanah longsor di Desa Jangkurang yang berfokus pada pembangunan TPT sebagai bentuk pelaksanaan mitigasi struktural. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti mengetahui terkait gambaran faktual tentang bagaimana dan apa yang terjadi pada fenomena yang ada, sehingga peneliti dapat membuat sebuah interpretasi terhadap makna dari data dan informasi yang didapatkan dengan menggunakan triangulasi data sebagai upaya uji validitas data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Bentuk dan Tahapan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan TPT Sebagai Upaya Mitigasi Di Desa Jangkurang

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Tahapan ini merupakan tahap awal partisipasi masyarakat yang berpengaruh terhadap kelancaran suatu program pembangunan. Tahap ini secara langsung juga memperlihatkan seberapa tinggi tingkat antusiasme masyarakat terhadap program atau kegiatan

kemasyarakatan yang sedang direncanakan. Partisipasi pada tahap ini membahas mengenai perlu tidaknya pembangunan TPT melalui penentuan program prioritas pembangunan desa. Selain itu, tahapan ini juga membahas mengenai penentuan lokasi, jadwal musyawarah, pihak yang membangun, serta berbagai pengambilan keputusan lain yang mempengaruhi upaya mitigasi bencana melalui pembangunan TPT.

Program pembangunan TPT merupakan salah satu program prioritas desa yang tercantum dalam RKP, RPJMDes serta APBDES Desa Jangkurang dari tahun ke tahun bahkan hingga saat ini. Pembangunan TPT terbagi kedalam dua jenis yakni Pembangunan TPT untuk kawasan tebing dan TPT untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai upaya untuk mencegah terjadinya erosi dan perluasan DAS. Program pembangunan TPT ini sejalan dengan regulasi pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2022 Pasal 34 ayat (2) huruf a yang menjelaskan bahwa kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui peraturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan (Perda Kabupaten Garut No 12, 2022).

Penggerak utama program pembangunan TPT ini adalah masyarakat. Dapat dikatakan demikian karena adanya program pembangunan TPT menjadi program pembangunan prioritas desa merupakan wujud dari partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya pada proses musyawarah. Keputusan terhadap urgensi bahwa TPT merupakan hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Jangkurang didasarkan pada masalah dan kebutuhan yang ada di wilayah masyarakat itu sendiri melalui hasil musyawarah berjenjang mulai dari musyawarah RT/RW, kemudian naik ke musyawarah dusun, lalu dilaporkan lagi ke musyawarah desa. Dengan kata lain input pengambilan keputusan terhadap program pembangunan prioritas didasarkan pada skala terkecil sebagai pihak yang memahami secara mendalam mengenai kondisi dan kebutuhan wilayahnya masing-masing, sehingga mereka tahu tentang hal mendesak apa saja yang perlu di dahulukan di wilayahnya untuk di bahas bersama dalam musyawarah dengan melibatkan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat di tingkat desa.

Pemerintah Desa bersama BPD juga melakukan sosialisasi terkait pembangunan TPT sebagai bentuk mitigasi struktural yang tercantum dalam kebijakan Pemerintah Daerah. Ketertarikan masyarakat untuk membangun TPT di wilayah tempat tinggalnya menjadi motivasi mendasar dalam keterlibatan masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan mulai dari level terendah yakni pada musyawarah RT/RW hingga mencapai musyawarah Desa. Masyarakat biasanya menyampaikan ide gagasan dengan menyuarakan masalah apa yang ada di wilayahnya, kegiatan atau program apa yang diperlukan, serta urgensi pelaksanaan pembangunan yang akan menghasilkan keputusan terkait bentuk kegiatan atau program yang perlu dilaksanakan, lokasi pembangunan, serta pihak mana yang akan melaksanakan pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Cohen & Uphoff bahwa bentuk partisipasi pada pengambilan keputusan berkaitan dengan seluruh perencanaan.

Selain itu, Adanya kepentingan sosial berupa manfaat terhadap kemudahan aksesibilitas masyarakat sekitar untuk melakukan mobilisasi mengungkapkan bahwa kebermanfaatan suatu program berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat untuk lebih sadar terhadap ancaman dan risiko bencana yang terjadi di lingkungan hidup mereka.

Partisipasi aktif masyarakat Desa Jangkurang juga dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan penyampaian aspirasi dalam forum musyawarah. Meskipun pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tidak semua masyarakat berkesempatan untuk ikut serta secara langsung, namun dengan adanya pihak yang mewakili yakni RT, RW, tokoh masyarakat serta lembaga kemasyarakatan lainnya yang turut andil dan hadir dalam musyawarah tersebut

dengan membawa berbagai bentuk aspirasi masyarakat yang pada hasil musyawarah RT/RW dan musyawarah dusun maka masyarakat telah berpartisipasi aktif secara tidak langsung.

Pada tahap pengambilan keputusan ini Pemerintahan Desa hanya berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam musyawarah untuk menetapkan perencanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan kegiatan desa saja terutama dalam hal pengelolaan anggaran dana desa. Selain dari hal-hal tersebut proses pengambilan keputusan dalam menentukan skala prioritas usulan pembangunan desa dikembalikan kepada masyarakat melalui penetapan keputusan secara bersama-sama. Meskipun demikian, Pemerintah Desa tetap memiliki peran dalam menetapkan nilai terhadap masukan yang diberikan masyarakat. Artinya Pemerintah Desa tetap selektif dalam menerima gagasan dari masyarakat sehingga perlu melakukan filterisasi dan verifikasi lapangan terhadap setiap masukan yang disampaikan pada forum. Hal ini dilakukan untuk meninjau seberapa besar lingkup kebermanfaatan program atau kegiatan yang hendak diputuskan bagi kepentingan masyarakat dengan sistem pengambilan keputusan yang dititik beratkan pada masukan masyarakat, namun tetap melakukan pengkajian pada setiap pengambilan keputusan yang harus bersifat rasional serta demi kepentingan umum.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan akan bergantung pada kebutuhan serta kondisi masyarakat. Apabila diperlukan suatu pengambilan keputusan yang bersifat mendesak seperti saat kejadian bencana di Singkur, maka masyarakat dan pemerintah setempat dapat melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan darurat melalui pengalihan dana pembangunan agar bisa menangani kondisi tanggap darurat bencana.

2. Partisipasi dalam Implementasi

Partisipasi dalam implementasi merupakan wujud dari kesesuaian antara proses perencanaan dengan pelaksanaannya kegiatan. Tahapan ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program-program mitigasi bencana, salah satunya pembangunan TPT dapat direalisasikan dengan adanya input atau keikutsertaan dari masyarakat melalui pemberian kewenangan, kontribusi tenaga dan sumber daya lainnya yang dapat mendorong keberhasilan suatu program mitigasi bencana. Tahapan ini juga akan membahas mengenai seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi sehingga mampu mencapai tujuan pada perencanaan yang telah disusun dalam tahap pengambilan keputusan.

Pelaksanaan pembangunan TPT di Desa Jangkurang didukung oleh keinginan dan kesadaran masyarakat untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana tanah longsor yang berpotensi terjadi di wilayahnya. Dengan adanya keputusan pembangunan TPT sebagai pembangunan prioritas desa menunjukkan adanya kontribusi pemikiran dari masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Tanggapan masyarakat dalam pembangunan TPT sebagai program pembangunan prioritas desa juga bersifat positif, banyak masyarakat yang berpikir bahwa TPT merupakan infrastruktur yang diperlukan di Desa Jangkurang sebagai wilayah yang didominasi oleh bukit dan gunung sehingga memiliki risiko dan ancaman bencana tanah longsor.

Terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam implementasi pembangunan TPT di Desa Jangkurang, antara lain :

a. Penyelenggaraan Pembangunan

Dalam pelaksanaannya, pembangunan TPT dapat dilakukan oleh pihak luar atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintahan Desa, namun pembangunan TPT juga dapat dilakukan oleh swadaya masyarakat sekitar lokasi pembangunan TPT. Sebagian besar pembangunan TPT di Desa Jangkurang dilakukan oleh swadaya masyarakat dengan tujuan

untuk mengoptimalkan anggaran pembangunan yang terbatas serta mewujudkan kualitas TPT yang diinginkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Kontribusi tenaga dari swadaya masyarakat secara sukarela memberikan dorongan penuh pada keberhasilan penyelenggaraan pembangunan TPT di Desa Jangkurang. Dapat dikatakan demikian karena berdasarkan hasil wawancara, pembangunan TPT yang dilakukan oleh tenaga profesional memerlukan biaya yang lebih besar untuk membayar jasanya. Jika masyarakat dengan sukarela berkontribusi serta peran dari RT dan RW yang juga memiliki kepemimpinan yang baik bagi pembangunan di wilayahnya, maka biaya pembangunan TPT tidak akan terlalu besar serta cukup untuk didanai menggunakan dana APBDES.



Gambar 2. Swadaya Masyarakat dalam Membangun TPT

Kontribusi lainnya dari masyarakat berupa memberikan makan dan minum kepada swadaya masyarakat yang telah membantu dalam proses pembangunan sebagai bentuk gotong royong, juga sebagai bentuk motivasi agar dapat mempercepat dan mengoptimalkan pembangunan TPT secara efektif dan efisien.

b. Pengawasan Pembangunan

Setiap penyelenggaraan pembangunan memerlukan pengawasan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mampu berlangsung dengan optimal. Sistem pengawasan pembangunan TPT biasanya dilaksanakan dari awal pelaksanaan pembangunan TPT hingga selesai. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengukur tingkat ketahanan TPT berdasarkan hasil pengerjaan yang telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaannya baik pada kesesuaian ukuran TPT maupun bahan yang digunakan dalam pembangunan TPT. Proses pengawasan secara formal biasanya dilakukan oleh para pemangku kepentingan setempat seperti Pendamping Desa, Pendamping Lapangan, Pemerintahan Desa terutama Kepala Desa, BPD, pihak Kecamatan, serta masyarakat yang biasanya oleh RT dan RW setempat juga tokoh masyarakat. Input masyarakat pada proses pengawasan biasanya dalam bentuk keterwakilan terhadap perbaikan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengawasan pembangunan sudah berjalan dengan baik dan cenderung bersifat informal yang bahkan diikuti dengan tindak lanjut dari masyarakat itu sendiri dengan inisiatif untuk membangun dan memperbaiki kesalahan atau kekurangan pada proses pembangunan TPT agar mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan setiap pembangunan TPT merupakan keinginan dan rekomendasi dari masyarakat, dimana mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas pembangunan yang mereka inginkan.

c. Pemeliharaan Lingkungan dan TPT

Partisipasi masyarakat dalam implementasi juga dapat berupa kegiatan pemeliharaan proyek atau pembangunan. Proses pemeliharaan pada pelaksanaan program pembangunan

memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektifitas pembangunan dalam melaksanakan fungsinya agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Dalam konteks pemeliharaan TPT, masyarakat Desa Jangkurang menginterpretasikannya ke dalam pemeliharaan lingkungan saja yang dibentuk dalam program kerja bakti untuk membersihkan lingkungan secara rutin dan terjadwal. Pemeliharaan yang dilakukan masyarakat Desa Jangkurang lebih berfokus pada kebersihan lingkungan namun tidak memperhatikan aspek pemeliharaan infrastruktur desa.

Program pemeliharaan secara khusus di Desa Jangkurang belum terbentuk, sehingga kegiatan pemeliharaan terkesan dikembalikan lagi kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2019) menjelaskan bahwa pada dalam pelaksanaan pemeliharaan proyek atau program kemasyarakatan menjadi suatu hal yang sering dilupakan oleh masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan pelaksanaan pembangunan TPT di Desa Jangkurang dimana proses pemeliharaannya tidak menjadi perhatian dan cenderung dilupakan pada tahap implementasi program. Padahal pemeliharaan program pembangunan dapat menjadi faktor pendorong bagi pembangunan TPT agar dapat dinikmati dalam jangka waktu panjang.

Antusiasme warga untuk mengimplementasikan program pembangunan TPT cukup baik, namun sebaik-baiknya program apabila masyarakat tidak mampu diimbangi dengan pemeliharaan maka akan sulit terbangun dalam jangka waktu panjang dan mencapai keberhasilan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi pembangunan TPT di Desa Jangkurang sebagai upaya mitigasi bencana tanah longsor dapat dikatakan kurang baik meskipun masyarakat berkontribusi tinggi dalam proses pelaksanaannya. Dapat dikatakan demikian karena unsur penting dalam keberhasilan program tidak dapat terselenggara dengan baik yakni pada proses pemeliharaan. Hal ini ditunjukkan melalui kejadian bencana yang diakibatkan dari kurangnya partisipasi masyarakat pada pemeliharaan infrastruktur TPT.

Partisipasi yang belum optimal terutama pada tahap implementasi masyarakat belum bisa mendukung keberhasilan pembangunan TPT sebagai mitigasi bencana tanah longsor di Desa Jangkurang ini dipengaruhi oleh dua kendala. Berikut uraian kendala dalam partisipasi masyarakat terhadap pembangunan TPT berdasarkan hasil analisis dari bentuk dan tahapan partisipasi masyarakat Desa Jangkurang :

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa setelah dibangun TPT maka kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi dan upaya mitigasi sudah selesai dilaksanakan. Padahal partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan TPT juga menjadi sebuah langkah mitigasi agar TPT dapat berdiri kokoh dalam jangka waktu panjang. Jika masyarakat terus berpikiran demikian maka setiap TPT tidak akan lama dan cenderung akan menjadi malapetaka apabila dibiarkan begitu saja, sebagaimana yang sudah terjadi di Kampung Singkur. Dengan begitu program pembangunan TPT tidak dapat mencapai keberhasilannya untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan ini dipengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai TPT dan mitigasi bencana tanah longsor. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Garut juga menyampaikan hal yang sama dimana kendala pelaksanaan mitigasi itu terletak pada istilah mitigasi atau pencegahan yang masih belum familiar di masyarakat. Jika terdapat segelintir orang yang melakukan pemeliharaan terhadap TPT, maka masyarakat lain akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting bagi masyarakat

untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan TPT sebagai upaya mitigasi bencana tanah longsor.

b. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua RW 11 Desa Jangkurang ia mengaku bersama koleganya yang lain telah mengajukan pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya partisipasi aktif mereka terhadap keberhasilan program terutama mengenai pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan. Namun hal ini tak kunjung mendapatkan respon dari Pemerintah Desa Jangkurang itu sendiri. Kurangnya dorongan semacam ini, tentu saja dapat menghambat perkembangan komunitas dan potensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal termasuk pembangunan TPT. Dalam kendala kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat terhadap pemeliharaan mencerminkan kurangnya upaya atau kebijakan dari pemerintah desa untuk merangsang atau mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan program pembangunan TPT. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang dapat mendorong upaya pembangunan di wilayahnya, Pemerintah Desa Jangkurang cenderung hanya mengembalikan lagi proses pembangunan kepada masyarakat dan mengawasinya tanpa melihat bahwa pemeliharaan menjadi suatu hal penting bagi infrastruktur pencegahan bencana tanah longsor ini.

Hal ini cukup berbanding terbalik dengan teori dari Cohen & Uphooff yang menyatakan bahwa administrator cenderung berfokus dan mengutamakan tahap implementasi dibandingkan dengan tahap pengambilan keputusan. Namun di Desa Jangkurang sendiri tahap implementasi cenderung di titik beratkan pada keputusan dari masyarakat dan tanpa adanya dukungan dari Pemerintahan Desa baik berupa sosialisasi terhadap pentingnya pemeliharaan TPT, penggunaan drainase dan terasering, maupun upaya untuk melakukan pemeliharaan lainnya dalam bentuk kebijakan atau peraturan yang mengikat demi ketertiban dan keberhasilan program pembangunan TPT.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Pada dasarnya setiap pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dari tujuan program seutuhnya. Biasanya pengambilan manfaat sendiri dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat yang melakukan atau turut serta dalam kegiatan tersebut. Dapat dikatakan demikian karena pengambilan manfaat merupakan output yang dihasilkan dari tahap implementasi sebagai bentuk optimalisasi manfaat dari kegiatan atau program pembangunan. Hal ini juga termasuk dalam program pembangunan TPT, dimana seluruh kegiatan pembangunan mengikutsertakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menangani masalah yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, manfaat dari pembangunan TPT menjadi wujud yang diterima dari pengorbanan atau kontribusi masyarakat selama proses pembangunan. Berdasarkan teori Cohen & Uphoff partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek antara lain :

a. Manfaat materi

Manfaat materi yang didapatkan masyarakat Desa Jangkurang pada pembangunan TPT salah satunya berupa peningkatan aset yakni mendapatkan lahan baru atau memiliki halaman yang semakin luas. Dari hasil perluasan lahan ini, masyarakat memiliki kebebasan

untuk memanfaatkannya dalam berbagai hal, seperti menanam tanaman produktif sehingga dapat dikonsumsi untuk keperluan pribadi maupun untuk dijual kembali. Kemudian menjadikan lahan tambahan tersebut sebagai lahan untuk memulai bisnis seperti membangun warung, atau bahkan hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Artinya selain mendapatkan penambahan aset, secara tidak langsung masyarakat juga mendapatkan manfaat dalam peningkatan konsumsi dan pendapatannya yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Selain itu, dengan adanya pembangunan TPT masyarakat dapat memanfaatkan aliran air yang mengalir lewat TPT untuk dialihkan alirannya kemudian ditampung sebagai persediaan air untuk mengairi lahan pertanian atau perkebunan pribadi. Jarak sumber air dengan lahan pertanian dan perkebunan warga cukup jauh sehingga memerlukan sistem pengairan yang lebih efisien. Pengambilan manfaat melalui penampungan air ini dapat meningkatkan kemudahan petani untuk mendapatkan air bagi pertanian atau perkebunannya dengan nilai yang ekonomis. Hal-hal ini tentu saja merupakan bentuk pengambilan manfaat yang bisa dilakukan bagi masyarakat yang tinggal disekitar area pembangunan TPT.

b. Manfaat Sosial

Pengambilan manfaat sosial ini dapat berupa layanan atau fasilitas publik. Di Desa Jangkurang sendiri pengambilan manfaat pada pembangunan TPT selain mendapatkan infrastruktur penahan tanah untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor, TPT juga dapat membentuk jalan lingkungan atau bahkan memperluas jalan lingkungan sebagai infrastruktur layanan publik. Pembangunan TPT dan Jalan lingkungan di Desa Jangkurang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam berbagai aspek, terutama dalam konteks rekayasa sipil dan infrastruktur transportasi. Pasalnya fungsi TPT itu sendiri dirancang untuk menahan tekanan dan gerakan tanah pada lereng sehingga dalam konteks pembangunan jalan, TPT ini dapat mencegah longsor yang dapat merusak jalur jalan. Artinya pembangunan TPT ini dapat membantu mempertahankan stabilitas lereng dan mencegah potensi kerusakan jalan secara berkelanjutan. Dengan adanya kemudahan pada akses jalan yang semakin luas, masyarakat mengaku bahwa hal ini sangat bermanfaat bagi semua orang untuk melakukan mobilisasi secara lebih dekat, cepat dan mudah dari satu wilayah ke wilayah lain. Perluasan jalan ini membantu aksesibilitas masyarakat untuk melakukan segala bentuk kegiatan ekonomi seperti distribusi hasil tani, kerudung dan tas serta hal-hal lain yang dapat membantu perekonomian masyarakat itu sendiri dengan optimal karena dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Efektifitas dan efisiensi masyarakat dalam beraktivitas juga didukung dengan adanya infrastruktur jalan lingkungan yang lebar dan aman.



Gambar 3. TPT Jalan Lingkungan Dusun 3 Desa Jangkurang

c. Manfaat Personal

Manfaat personal cenderung menjurus kepada suatu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ketika ikut serta dalam pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat yang berada di sekitar pembangunan TPT, didapati bahwa terdapat manfaat pada perubahan perasaan dan perubahan pola pikir masyarakat terhadap risiko bencana tanah longsor.

Setelah pembangunan TPT dilaksanakan masyarakat mengaku lebih merasa aman dan tidak merasa khawatir terhadap ancaman dan bahaya bencana tanah longsor karena tanah yang lebih kokoh. Adanya pembangunan TPT ini juga merubah pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap potensi bencana yang ada di lingkungannya. Masyarakat yang sebelumnya acuh tak acuh terhadap kondisi wilayahnya kemudian menyadari bahwa struktur lingkungan tempat tinggalnya memerlukan pondasi yang kuat untuk menahan tanah longsor yang berdampak besar pada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan rawan tersebut. Perubahan pola pikir ini juga mempengaruhi perilaku masyarakat yang biasanya tidak terlalu memperhatikan lingkungannya menjadi memiliki kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang dituangkan dengan mengajukan pembangunan TPT dengan struktur yang kuat.

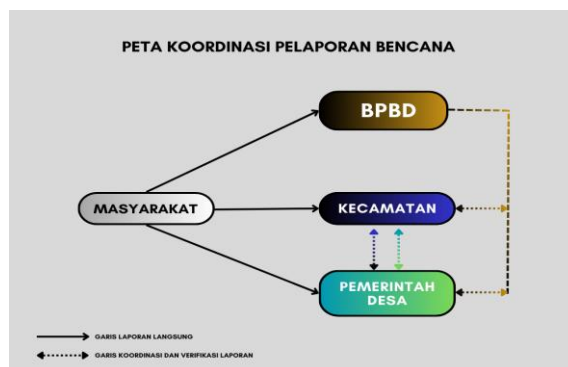
Manfaat Personal juga seringkali ditemukan terkait dengan kedudukan seseorang dalam kelompok sosial atau politik tertentu. Dengan menjadi kelompok kepentingan seperti menjadi anggota struktur kewilayahan, karang taruna, dan lembaga perwakilan masyarakat lainnya yang dapat mempengaruhi setiap pengambilan keputusan dan mendapatkan program yang mereka inginkan seperti pembangunan TPT untuk di bangun di lingkungannya sendiri. Adanya kesempatan dan kedudukan tersebut akhirnya dapat memberikan manfaat pembangunan TPT sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga mereka dapat merasakan manfaat yang tidak dapat dinikmati oleh orang lain diluar lingkungan pembangunan TPT tersebut. Hal ini tentu saja dapat merubah pandangan masyarakat lain yang tinggal diluar pembangunan TPT untuk ikut serta dan selalu berpartisipasi aktif dalam keanggotaan tersebut sehingga mampu mendapatkan manfaat yang sama.

Berdasarkan penjabaran terhadap bentuk-bentuk pengambilan manfaat diatas, menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan manfaat sudah berlangsung dengan baik dan optimal. Pada tahapan ini masyarakat memegang kontrol penuh terhadap hal-hal yang dapat mereka lakukan untuk mendapatkan manfaat lain dari adanya pembangunan TPT, baik manfaat material, manfaat untuk diri pribadi, serta manfaat bagi khalayak umum. Hal ini juga menunjukan bahwa pembangunan TPT tidak hanya memberikan manfaat secara fisik dalam mencegah risiko tanah longsor saja, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana tanah longsor. Dengan keberadaan tembok penahan tanah, masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya tindakan proaktif dalam mengurangi risiko dan dampak bencana tanah longsor. Oleh karena itu pembangunan TPT dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil guna melindungi kehidupan, properti, dan lingkungan mereka dari potensi bahaya tanah longsor.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Tahap evaluasi juga biasanya merupakan bentuk pengawasan dan penilaian pada kegiatan pembangunan yang diperlukan untuk memperoleh feedback terhadap keberhasilan

atau kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana yang telah dirancang. Dalam proses evaluasi kegiatan pembangunan secara formal dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dalam bentuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa, BPD, LPM, dan Pemerintah Kecamatan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap awal yakni 0% hingga tahap akhir mencapai 100%. Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk meninjau keberlangsungan pembangunan, termasuk pembangunan TPT agar berjalan dengan baik serta meminimalisir kekurangan dan kendala yang dapat terjadi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi ini cenderung bersifat keterwakilan. Artinya masyarakat tidak dapat berpartisipasi langsung secara personal dalam forum evaluasi tersebut yang mana bentuk penyampaian aspirasi, saran dan masukan masyarakat terhadap evaluasi pembangunan TPT ini hanya dapat disampaikan kepada pihak atau kelompok yang mewakili masyarakat seperti RT dan RW selaku kepala wilayah dan kepada lembaga kemasyarakatan desa yakni BPD. Dalam konteks ini, evaluasi masyarakat terhadap pembangunan TPT sama dengan mekanisme koordinasi dalam pelaporan pengawasan dan kejadian bencana. Dimana masyarakat menyampaikan segala bentuk aspirasi, saran dan masukannya terhadap pembangunan TPT kepada RT, RW dan BPD dalam bentuk dialog secara langsung maupun melalui media komunikasi.



Gambar 4. Gambaran Peta Koordinasi Laporan Bencana Kabupaten Garut

Evaluasi yang disampaikan masyarakat kepada pemangku kepentingan ini kemudian akan disampaikan ke dalam forum evaluasi bersama pihak pemerintahan setempat untuk di tindak lanjut. Mekanisme representatif ini dapat menjadi cara efektif untuk menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh yang sebelumnya diinformasikan kepada masyarakat tanpa mengharuskan setiap individu terlibat secara langsung. Namun, dalam hal ini tidak dapat menjamin setiap bentuk aspirasi dan masukan dari masyarakat dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang didapatkan.

Partisipasi masyarakat secara informal pada tahap evaluasi di Desa Jangkungan cenderung merujuk pada aspirasi yang memerlukan tindakan langsung. Tidak sedikit dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya secara informal kepada pemangku kepentingan setempat, namun masyarakat tetap berinisiatif untuk melakukan perubahan pada pembangunan TPT agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini karena bentuk evaluasi dan keluhan dari masyarakat terhadap pembangunan TPT hanya terkait struktur pembangunan TPT mulai dari tinggi TPT, tingkat kelebarannya, hingga jumlah bahan dan kekurangan bahan yang digunakan. Oleh karena itu, masyarakat juga terkadang menilai bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses evaluasi itu cukup tabu.

Berdasarkan hasil wawancara pada hasil evaluasi secara menyeluruh, masyarakat merasa puas pada pembangunan TPT saat ini dan menilai bahwa saat ini pengawasan dan evaluasi lebih sering dilaksanakan dibandingkan dengan masa kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya. Sehingga pembangunan TPT saat ini dirasa semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi pembangunan TPT tidak melibatkan masyarakat secara penuh, namun dilakukan melalui kelompok/lembaga perwakilan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan pada pembangunan TPT di Desa Jangkurang di wakikan oleh RT, RW dan BPD di masing-masing wilayah pembangunan TPT tersebut. Pada pelaksanaan kegiatan evaluasi ini masyarakat hanya berkesempatan untuk menyampaikan saran dan masukannya kepada pihak perwakilan masyarakat yang kemudian akan disampaikan pada forum evaluasi secara formal bersama pemangku kebijakan atau Pemerintahan setempat yang berkaitan dengan program pembangunan desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi bersifat semu.

B. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan TPT Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Di Desa Jangkurang

Partisipasi dalam tahap pengambilan keputusan : berada pada tingkat *Tokenism* (semu) tangga ke-5 yakni *Placation* (penentraman). Hal ini didasarkan pada definisi dari tingkat *Placation* yang sejalan dengan partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan atau program melalui pemberi ide, nasihat atau gagasan, namun pemegang kekuasaan yakni Pemerintah Desa Jangkurang tetap yang menentukan dan menilai legitimasi atau kelayakan dari gagasan yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat serta Pemerintah Desa Jangkurang melakukan musyawarah dengan tujuan untuk mengetahui masalah dan kebutuhan yang ada di masyarakat terutama mengenai program pembangunan desa.

Partisipasi dalam tahap implementasi : berada pada tingkat *Citizen Power* tangga ke-6 yakni *Partnership* (kemitraan). masyarakat maupun Pemerintah Desa sepakat untuk saling bertanggung jawab terutama pada proses pembangunan TPT. Masyarakat bebas untuk menentukan pilihan terkait pihak yang akan membangun TPT tanpa paksaan dari pihak manapun serta didasari oleh kesepakatan bersama antara masyarakat dan Pemerintah Desa. Setelah kesepakatan didapatkan pada forum, apabila pembangunan TPT dibantu oleh swadaya masyarakat, maka RT dan RW selaku koordinator wilayah mengajak masyarakat yang mau dan mampu membantu secara sukarela dalam musyawarah dan pelaksanaan pembangunan TPT dengan membentuk struktur organisasi yang terdiri dari ketua, bendahara dan sekretaris agar memiliki tanggungjawabnya masing-masing dan lebih terkonsep. Hal ini sejalan dengan teori dari tingkat partisipasi *partnership* dimana proses pembangunan dapat berjalan dengan efektif jika dalam masyarakat memiliki kekuasaan yang terorganisir, memiliki pemimpin yang bertanggung jawab serta pengelolaan dana yang jelas.

Partisipasi dalam tahap pengambilan manfaat : masyarakat Desa Jangkurang memiliki kontrol penuh terhadap pembangunan TPT dengan memaksimalkan pengambilan manfaat dari adanya TPT, terutama bagi masyarakat yang secara langsung berada pada kawasan pembangunan TPT. Kebebasan untuk memanfaatkan hasil pembangunan TPT yang memberikan keuntungan bagi masyarakat ini tidak dibatasi oleh pihak manapun karena masyarakat juga memegang tanggung jawab penuh terhadap pembangunan TPT. Oleh karena itu masyarakat dapat mengambil manfaat dengan optimal pada pembangunan TPT yang

diselenggarakan. Oleh karenanya tahap pengambilan manfaat berada pada tingkat *Citizen Power* tangga ke-8 yakni *Citizen Control* (kontrol masyarakat).

Partisipasi dalam tahap evaluasi : masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berpendapat atau memberikan gagasan secara langsung dalam menilai kinerja dan hasil dari pembangunan pada forum atau pertemuan resmi, melainkan menyampaikan masukan dan saran dalam bentuk keterwakilan secara informal. Hal ini sejalan dengan definisi dari *Informing* sendiri yang menjelaskan bahwa pemberitahuan terkait informasi pembangunan hanya bersifat satu arah sehingga masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berpendapat terkait program pembangunan yang dirancang untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dengan begitu tergambar dengan jelas bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi berada pada tingkat *Tokenism* tangga ke-3 yakni *Informing* (pemberitahuan).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana tanah longsor melalui kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Jangkurang sudah baik dengan adanya motivasi masyarakat terhadap manfaat yang didapatkan dari pembangunan TPT bagi masyarakat itu sendiri. Akan tetapi partisipasi ini belum berjalan optimal sehingga tujuan pembangunan tidak dapat tercapai dengan maksimal. Partisipasi secara penuh hanya ada pada tahap pelaksanaan dan tahap pengambilan manfaat. Namun disisi lain kontrol penuh masyarakat yang berpartisipasi pada tahap implementasi dan pengambilan manfaat belum mampu mencapai keberhasilan program mitigasi yang diinginkan karena kendala pada kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya dorongan dari Pemerintah Desa. Sementara pada tahap pengambilan keputusan dan tahap evaluasi masih didominasi oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat tertentu sebagai pihak perwakilan sehingga partisipasi masyarakat secara keseluruhan masih bersifat semu pada kedua tahapan tersebut. Dengan demikian bentuk dan tahapan dari partisipasi masyarakat belum bisa mencapai tujuan dari upaya mitigasi secara optimal.

Antusiasme yang tinggi dari masyarakat Desa Jangkurang dalam pembangunan TPT dapat menjadi potensi lokal bagi Desa Jangkurang untuk melaksanakan mitigasi bencana berbasis partisipatif, namun kurangnya kapasitas masyarakat terhadap kebencanaan menjadi kendala utama yang memerlukan perhatian lebih karena berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi. Oleh karenanya diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan yang dapat di dukung oleh Pemerintahan setempat melalui pemasangan poster, sosialisasi dan pelatihan kebencanaan seperti langkah-langkah pencegahan dan evakuasi serta simulasi bencana, membentuk kegiatan pemeliharaan lingkungan dan penanaman pohon, serta membentuk sistem pelaporan komunitas terkait perubahan kondisi tanah dan cuaca melalui pesan singkat WhatsApp atau SMS dengan menetapkan sistem insentif sebagai bentuk penghargaan bagi masyarakat yang berperan aktif dalam pelaporan kebencanaan maupun dalam pemeliharaan lingkungan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Sumantri. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik* (B. A. Saebani, Ed.; 1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut. (2022). *Infografis Kejadian Bencana Perbulan Tahun 2022*. Infolaras. <https://infolaras.bpbdd.garutkab.go.id/infografis/>
- Bidang Statistik Diskominfo Jawa Barat. (2020, August 21). *Top 3 Kejadian Bencana di Jawa Barat Tahun 2015-2020*. Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/top-3-kejadian-bencana-di-jawa-barat-tahun-2015-2020>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. In *World Development* (Vol. 8). [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Creswell, J. W., & Creswell, D. J. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE.
- Fajriah, M. N. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Permasalahan Sampah Melalui Bank Sampah Di Desa Pete Tigaraksa Kabupaten Tangerang* [Universitas Padjadjaran]. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41314>
- Kinanthi, R. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Bencana Untuk Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan. *Pengembangan Masyarakat Islam*, 6, 22–28. <http://dx.doi.org/10.21043/cdjpmi.v6i1.14658>
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (5th ed.). Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, 1 (2022).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (2008).
- Silitonga, L. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus*. Universitas Bandar Lampung.
- Tawai, A., & Yusuf, Muh. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan* (H. Amiruddin, Ed.; 1st ed.). Literacy Institute.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24 (2007).
- Warsono, H., & Buchari, R. A. (2019). *Kolaborasi penanganan bencana*. <https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/152/1/Buku%20Kolaborasi%20Bencana.pdf>
- Zubir, S. S., & Amirrol, H. (2011). Disaster risk reduction through community participation. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, 148, 195–206. <https://doi.org/10.2495/RAV110191>